

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perekonomian Indonesia sesuai UUD 1945 tentang tiga pelaku utama yakni pemerintah, swasta dan koperasi. Ketiga pelaku utama ini diharapkan memiliki peranan dan perlakuan yang sama dalam perekonomian. Pada dasarnya pemerintah, swasta dan koperasi memegang peranan yang penting dalam mewujudkan suatu kondisi ekonomi suatu negara. Dengan adanya hubungan yang saling berkesinambungan antara pemerintah, swasta dan koperasi akan memberikan suatu dampak yang sangat signifikan dalam peningkatan taraf ekonomi dan aktivitas ekonomi suatu negara.

Menurut Putra, D.C (2022) Pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai penguasa suatu negara atau badan tertinggi yang memerintahkan suatu negara. Pengertian dari swasta adalah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor yang mempengaruhi swasta berbeda dengan pemerintahan, seperti tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran dan sistem akuntansi.

Definisi koperasi Indonesia menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang

seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berbasaskan kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perekonomian suatu negara, pemerintah, swasta dan koperasi tentunya memiliki peranan yang penting. Yangmana pemerintah memiliki fungsi yaitu mengarahkan, mengawasi serta menjadi tokoh dalam perekonomian negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas (Putra, D.C, 2022).

Pihak swasta terfokus mencari keuntungan dari berbagai bentuk barang maupun jasa namun, keuntungan yang diperoleh tentu bagi golongan maupun individu yang terlibat. Demikian, pihak swasta tetap berperan penting dalam perekonomian negara karena dalam prosesnya, pihak swasta membantu masyarakat seperti menyerap tenaga kerja, memberikan peningkatan daya beli dan kreatifitas masyarakat, hingga menambah pemasukan negara (Putra, D.C, 2022).

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang besar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan

masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (Tukimin, S.E., dan MA, M. 2018).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur tentang akuntansi perkoperasian bagi badan usaha koperasi ialah PSAK N0.27. PSAK N0.27 ini mengatur tentang transaksi yang terjadi dari hubungan koperasi bagi anggotanya, meliputi transaksi setoran anggota koperasi, transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi, dan penyajian serta pengungkapan laporan keuangan.

Adapun peranan akuntansi dalam mencapai tujuan koperasi adalah dalam hal penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat digunakan pihak koperasi sebagai alat pertanggungjawaban, penilaian kinerja, pengambilan keputusan serta pengawasan. Laporan keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal apabila penyusunannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Sebagian besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah kesulitan untuk memahami serta menerapkan SAK umum. Dibandingkan dengan SAK umum, SAK ETAP memberikan banyak kemudahan bagi suatu entitas dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Salah satu alasan diterbitkannya SAK ETAP yakni untuk mempermudah suatu entitas yang berskala kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan SAK ETAP, laporan

keuangan yang lengkap meliputi, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan yang lengkap berarti suatu entitas harus menyajikan setidaknya dua periode dari setiap laporan keuangan dan catatan yang diperlukan untuk laporan keuangan yang terkait.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 7.823 koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia. Data BPS juga menyebutkan bahwasannya melihat pada data di Jawa Timur, tercatat bahwa ada 1.023 KSP di 2021. Pembentukan koperasi juga bisa dilakukan dengan cara yang sangat mudah, untuk mendirikan koperasi primer dibutuhkan paling sedikit 20 orang, sementara untuk koperasi sekunder bisa didirikan paling sedikit tiga orang. Perizinan, dan pengawasan koperasi simpan pinjam berada di bawah Kemenkop UKM, di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230130133222-72-409317/awas-ini-bahaya-nyimpan-duit-di-koperasi-simpan-pinjam>

Pada tanggal 23-25 Mei 2023 Dinas Tenaga Kerja mengadakan Diklat Pelaporan Keuangan Koperasi yang dilaksanakan di Madiun. Peserta dalam diklat tersebut sebanyak 60 bendahara koperasi. Salah satu tujuan dari diadakannya diklat ini yakni untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi bendahara koperasi dalam penyusunan laporan keuangan. Diklat ini diadakan karena masih terdapat beberapa koperasi

yang belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP, salah satunya pada Koperasi Primkopabri Cabang Ponorogo.

Koperasi Primkopabri Ponorogo merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Ponorogo. Koperasi Primkopabri Ponorogo beralamat di Jl. Serakung Rt 01/Rw 02 Kel.Purbosuman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi, laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septiawati, P dan Hafni, D.A (2023), hasil menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Cu Satu Hati Minggir Sleman telah menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan PHU, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Cu Satu Hati Minggir Sleman sudah sesuai dengan SAK ETAP.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hafidzah, N. Sriwiyanti, E. dan Sinaga, M. H (2022) hasil menunjukkan bahwa laporan keuangan pada Koperasi Karyawan PTPN IV Bah Jambi belum menerapkan SAK ETAP dengan benar. Dalam penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Bah Jambi terdapat beberapa pos yang tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP yaitu tidak terdapatnya akun properti investasi, aset tidak berwujud, aset dan kewajiban pajak, kewajiban

diestimasi, akun laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, akun beban pajak dan penyajian catatan atas laporan keuangan belum sesuai dengan SK ETAP.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hafidzah, N., Sriwiyanti, E., dan Sinaga, M. H (2022) yang meneliti mengenai penerapan SAK ETAP terhadap penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hafidzah, N., Sriwiyanti, E., dan Sinaga, M. H ialah sama-sama meneliti penerapan SAK ETAP terhadap penyusunan laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hafidzah, N., Sriwiyanti, E., dan Sinaga, M. H ialah lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Koperasi Primkopabri Cabang Ponorogo, sedangkan pada penelitian Hafidzah, N., Sriwiyanti, E., dan Sinaga, M. H dilakukan di Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk memilih judul "*Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Primkopabri Cabang Ponorogo*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah pencatatan laporan keuangan pada Koperasi Primkopabri Cabang Ponorogo sudah sesuai dengan SAK ETAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui kesesuaian antara Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Primkopabri Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua yang memiliki kepentingan, diantaranya:

a. Bagi koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi koperasi dalam pelaporan keuangannya, sehingga koperasi dapat melaporkan hasil usahanya secara tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat memberi masukan bagi pembaca, khususnya dalam bidang perkoperasian.

c. Bagi peneliti

Peneliti menjadi lebih mengerti dan memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang koperasi, khususnya mengenai akuntansi perkoperasian.

